

ETIKA POLITIK NAHDATHUL ULAMA DALAM KONSTRUKSI KONSEP KENEGARAAN MODERN

Aqil Abdan Syakuran¹, Adrian Saputra Alfendi², Dewi angraini³, Kurniati⁴, Sofyan⁵

10200122053@uin-alaududin.ac.id¹, 10200122052@uin-alaududin.ac.id², 10200122040@uin-alaududin.ac.id³, kurniati@uin-alaududin.ac.id⁴, sofyan@uin-alaududin.ac.id⁵

Universitas Islam negeri Alauddin Makassar

Abstrak

Indonesia, sebuah negara hukum dengan sistem republik kesatuan, menonjol dengan keberagaman suku, agama, organisasi masyarakat (ormas), dan kekayaan budaya. Di antara ormas yang terkenal adalah Nahdlatul Ulama (NU), sebuah organisasi agama yang telah berdiri sejak sebelum kemerdekaan Indonesia. NU telah secara aktif terlibat dalam dinamika politik di Indonesia, memandu aksinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang membawa nilai-nilai etika dalam tatanan negara. Pendekatan empiris dalam penelitian ini melibatkan wawancara dengan para tokoh NU, yang menghasilkan pemahaman baru tentang etika politik dalam konteks negara modern melalui perspektif masyarakat NU.

Kata Kunci: Nahdlatul Ulama, Etika Politik, Negara modern

PENDAHULUAN

Etika politik merupakan cabang ilmu filsafat yang mengkaji moral dan perilaku dalam tindakan bernegara. Secara etimologis, konsep Etika berasal dari bahasa Yunani “ethos”, yang mengacu pada karakter atau watak seseorang. Etika merupakan hasil dari pembentukan budaya dan kebiasaan yang terinternalisasi dalam kegiatan sehari-hari. Melalui pengulangan tindakan tertentu, seseorang membentuk etika yang mencerminkan karakteristik dan kepribadiannya, yang lama kelamaan akan menjadi bagian integral dari watak mereka.

Kajian mengenai teori politik Islam yang dirumuskan oleh para ulama dan pemikir Islam terkemuka seperti Ibnu Abi Rabi', al-Farabi, al-Mawardi, al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan lain-lain, maka dapat ditemukan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan dalam Islam setelah melakukan kajian mendalam terhadap pemikiran-pemikiran mereka mengenai politik kenegaraan. Beberapa prinsip tersebut antara lain adalah Amanah (al-Mabda al-Amanah), Musyawarah (al-Mabda al-Syura), Persamaan (al-Mabda al-Musawa), Keadilan (al-Mabda al-'Adalah), dan Kemajemukan.

Dalam Islam, istilah politik dikenal dengan istilah “siyasah” yang berasal dari kata “sasa”, yang mengacu pada tindakan mengatur, mengelola, dan memerintah. Dari segi terminologi, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan siyasah sebagai “aturan yang mengatur dan menjaga ketertiban demi kesejahteraan bersama”. Lebih lanjut, konsep siyasah dapat diartikan sebagai suatu disiplin ilmu yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan suatu negara dan hal-hal yang berkaitan dengannya, dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan keteguhan.

Di Indonesia, etika politik sangat dibutuhkan dalam menjalankan roda pemerintahan, beberapa prinsip etika politik yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara dalam mengatur tindakan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, salah satunya adalah sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berkaitan dengan. Salah satu prinsip etika politik adalah keadilan sosial.

Sejak awal berdirinya, NU telah dihindangi mitos politik. Para perintis yang melahirkan NU dihantui oleh obsesi akan hari Indonesia merdeka. Ketika mereka mendirikan cabang SI di Mekkah pada awal masa remaja dan kemudian memulai beberapa organisasi sosial pendidikan dan bisnis koperasi, mereka menunjukkan orientasi pada masa depan sebuah negara merdeka, sebuah negara di mana komunitas Muslim bebas menjalankan hukum agama mereka. Lika-liku perjalanan panjang yang mereka lalui seringkali ditempuh dengan langkah setengah hati antara tanggung jawab terhadap status politik masa depan sebuah negara merdeka, namun enggan terlibat dalam percaturan politik.

Dalam ranah politik Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) memunculkan dirinya sebagai entitas yang signifikan dengan pengaruh yang meresap luas. Sebagai organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia, NU tidak sekadar menjadi wadah untuk ekspresi keagamaan, melainkan juga menghadirkan dimensi etika yang kuat dalam dinamika politik nasional. Dengan akar sejarah yang beragam dan warisan nilai-nilai Islam yang kokoh, etika politik Nahdlatul Ulama menekankan prinsip-prinsip moral, integritas, dan keadilan sebagai pijakan utama dalam setiap tindakan politiknya. Melalui pendekatan yang berorientasi pada kepentingan rakyat dan semangat inklusivitas, NU telah membentuk paradigma politik yang tidak hanya berbasis agama, melainkan juga mengusung pesan universal tentang integritas, kerjasama, dan pelayanan publik.

NU, sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, menjadi bukti nyata dari dampaknya yang luas dengan melihat jumlah pengikutnya. Sebanyak 56% dari penduduk Muslim Indonesia atau sekitar 88,7% dari total populasi Indonesia, yang berjumlah sekitar 237,7 juta orang, adalah pengikut NU. Selain itu, NU juga diwarnai oleh kehadiran tokoh-tokoh politik yang berasal dari lingkungan pesantren NU, seperti KH. H. Abdurrahman Wahid, yang dikenal dengan sebutan Gus Dur, yang memimpin Indonesia ke arah negara modern. Konsep negara modern yang diterapkan oleh Gus Dur mencakup prinsip-prinsip demokrasi, paham negara hukum, dan struktur negara yang bersifat kesatuan.

Dalam tulisan ini, peneliti akan mengeksplorasi esensi etika politik Nahdlatul Ulama (NU). Sementara penelitian sebelumnya cenderung memfokuskan pada pandangan para ahli mengenai etika politik dalam konteks negara modern dan menganalisis organisasi NU dengan menyoroti keunggulan tokoh-tokohnya dalam kepemimpinan negara, penelitian ini bertujuan untuk menggali nilai-nilai mendasar yang menjadi pijakan organisasi tersebut. Lebih dari sekadar mengulas peran tokoh NU dalam pemerintahan, tulisan ini akan menggambarkan dampak nilai-nilai tersebut dalam politik Indonesia melalui keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam muktamar NU. Dengan memahami landasan moral yang mendorong NU, kita dapat memperdalam pemahaman mengenai kontribusinya dalam membentuk lanskap politik Indonesia, dan hal ini menguatkan relevansinya dalam membentuk tatanan politik yang lebih adil dan berkelanjutan dalam konteks negara modern.

METODOLOGI

Metode Penelitian ini merupakan sebuah penjelajahan pustaka yang mengadopsi paradigma empiris yang cermat. Studi kepustakaan dijalankan sebagai instrumen analisis yang mendalam, menyusuri literatur, catatan, dan laporan yang relevan dengan permasalahan yang tengah diungkap. Fokus penelitian ini terletak pada konsep kenegaraan modern yang dipandang dari perspektif prinsip-prinsip etika politik, yang kemudian diterapkan pada Nahdlatul Ulama, salah satu organisasi massa terkemuka di Indonesia. Dengan memetakan nilai-nilai etika politik di lingkungan Nahdlatul Ulama, penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangan yang substansial dalam memahami dinamika

politik Indonesia secara lebih mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menjalankan kehidupan berpolitik di perlukan Etika Politik agar keadilan dapat di tegakkan. Etika politik ini perlu terus di tekankan Setiap masa dan waktunya sebagai pengingat bagi setiap partisipan Politik tanpa Etika Politik akan mengantarkan kehancuran dalam kehidupan bernegara. Ketika para pemimpin politik menyalahgunakan kekuasaan mereka demi kepentingan pribadi, banyak di antara mereka yang akhirnya terjatuh dalam urusan hukum.

Hubungan antara etika dan moral sangatlah dekat, karena keduanya membahas perilaku manusia untuk menilai baik atau buruk dari suatu tindakan. Namun, terdapat perbedaan yang substansial di antara keduanya. Moral menggunakan adat istiadat, kebiasaan, dan norma yang berlaku dalam masyarakat sebagai tolak ukur untuk menilai perilaku manusia, sementara etika lebih mengacu pada sistem nilai yang ada.

Meskipun secara konseptual etika dan moral memiliki makna yang serupa, dalam penggunaan sehari-hari keduanya dapat memiliki nuansa yang sedikit berbeda. Moral sering kali digunakan untuk menilai tindakan-tindakan tertentu, sementara etika berkaitan dengan penilaian terhadap sistem nilai yang digunakan dalam suatu konteks.

dalam etika dasarnya memiliki keberadaan kesatuan aturan yang erat hubungannya dengan moral yang tidak dapat di pisahkan terkait etika dengan kebudayaan dalam ilmu psikologi tidak jarang diarahkan terhadap konsep Individualisme-kolektivisme yang terarah pada etika yang berorientasi autonomy, community, dan divinity. Persoalan mengenai masyarakat non-barat yang seringkali dikaitkan dengan masyarakat asia.

Urgensitas Etika Politik dalam Prinsip Negara Modern

Prinsip etika politik muncul sebagai respons terhadap dinamika dan konflik yang seringkali mengiringi proses pemerintahan, menjadi landasan yang menetapkan standar perilaku bagi para pemimpin, terutama dalam konteks negara demokratis di mana partisipasi publik memiliki peranan signifikan dalam pembentukan kebijakan. Etika politik menjadi pilar penting dalam menilai kebijakan dan tindakan pemerintah oleh masyarakat, sebagai instrumen penentu apakah langkah-langkah yang diambil sesuai atau melanggar prinsip-prinsip moral dan hukum yang diamanatkan.

Demokrasi Indonesia bersandar pada dua landasan yang sangat kokoh, yakni: (1) Pancasila sebagai fondasi filsafat negara, khususnya dalam konteks sila keempat; (2) Prinsip politik negara yang menegaskan kedaulatan rakyat, yang pada intinya merupakan manifestasi dari landasan filsafat negara Indonesia yang memiliki kedudukan yang kuat dan merupakan bagian integral dari kelangsungan hidup negara, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pembukaan UUD 1945 yang memiliki status sebagai staatfundamentálnorm (prinsip dasar negara yang fundamental), sehingga secara hukum, demokrasi Indonesia tidak dapat dihapuskan.

Ciri khas dari sistem politik demokratis terletak pada struktur demokratis yang mendasari otoritas pemerintahan, memastikan bahwa unsur-unsur demokrasi tidak hanya menjadi prinsip-prinsip normatif dalam tatanan berbangsa dan bernegara, melainkan juga secara empiris telah berfungsi dalam batasan yang ditetapkan oleh prinsip-prinsip demokrasi.

Dalam sebuah negara demokrasi, konstitusi berfungsi sebagai landasan hukum tertinggi yang mengatur sistem pemerintahan. Pasal 1 ayat 1 Konstitusi Indonesia menyatakan bentuk negara Indonesia sebagai sebuah kesatuan republik. Ayat kedua menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, menetapkan bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Oleh karena itu, rakyat memiliki tanggung jawab untuk

memantau setiap tindakan dan kebijakan pemerintah, memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam konstitusi yang berlaku.

Di dalam negara hukum, etika politik memainkan peran penting dalam menegakkan hukum, memastikan pelaksanaannya dilakukan secara efektif dan bijaksana. Dalam konsep politik, hukum diartikan sebagai sikap yang memilih dari berbagai kemungkinan yang ada dalam masyarakat, yang kemudian diprioritaskan dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam konstitusi kita (UUD 1945), lalu diimplementasikan dalam produk-produk hukum. Dalam pengertian di atas jelaslah peran etika dalam politik hukum adalah menjaga sikap dalam perkembangan masyarakat sehingga dapat menjaga keharmonisan dalam konstitusi.

Selain itu, etika juga memainkan peran penting dalam menjaga Hak Asasi Manusia (HAM), sebab salah satu prinsip utamanya adalah prinsip keadilan, prinsip etika ini harus berfungsi sebagai landasan bagi perilaku manusia di dunia nyata. Menyadari prinsip ini untuk melindungi martabat manusia ini adalah alasan utama keberadaan suatu masyarakat, bangsa, atau negara. Pentingnya menjaga tatanan masyarakat dalam berbangsa tidak hanya untuk menjaga kedaulatan negara, tetapi juga untuk memastikan kelangsungan serta kestabilan institusi dan kesejahteraan seluruh warga negara.

Jika sebuah negara mampu menciptakan kekuasaan yang selaras dengan prinsip-prinsip etika, maka kemungkinan besar negara akan mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakatnya. Dalam situasi tersebut, masyarakat lebih cenderung untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik, sehingga etika politik memainkan peran penting dalam memperkuat demokrasi dengan memberikan suara kepada seluruh warga negara dalam pembuatan keputusan politik yang krusial.

Nilai Etika Politik Nahdatul Ulama Dalam konstruksi Negara Modern

Perlunya etika menjadi pengontrol kekuasaan, sebagaimana tercermin dalam berbagai perspektif, menjadi esensial untuk menjadi referensi utama dalam pembangunan dan pengelolaan negara. Etika, dengan demikian, tidak hanya mengontrol tindakan pemerintah, tetapi juga memperkuat landasan moral yang mendasari kebijakan publik dan interaksi sosial.

Menurut Gus Taqiyuddin salah satu pengurus NU di bogor Politik dalam bahasa Arab sering diistilahkan dengan kata “Siyasah” atau kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi siasat. Dalam konteks kebangsaan dan keummatan, politik sebagai siasat dibutuhkan sebagai strategi untuk memberikan kesjahteraan lahir dan batin. NU sebagai jam’iyyah sangat dibutuhkan kehadirannya untuk menjadi wasilah tercapainya tujuan-tujuan luhur politik tingkat tinggi, yakni terwujudnya keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umum. Sebagai panduan untuk kebaikan manusia di dunia ini dan di akhirat, Islam memberikan petunjuk kepada manusia dalam segala aspek kehidupan. Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar, dari yang paling sederhana hingga yang paling rumit. Tidak ada yang luput dari perhatian Islam dalam kehidupan manusia, tidak peduli seberapa kecilnya. Jika dibandingkan, Islam seperti jalan tol yang lurus dan naik, yang dapat membawa manusia ke posisi yang tinggi di mana di jalannya terdapat sebanyak aspek kehidupan manusia, salah satunya adalah aspek etika politik. Pandangan negatif terhadap praktik politik praktis saat ini disebabkan buruknya etika oknum tertentu dalam berpolitik. Mestinya Islam sebagai landasan dalam kehidupan bisa menjadi landasan etika politik, seperti jujur, adil, toleransi, dan mengedepankan nilai-nilai humanisme.

Dalam mewujudkan politik kebangsaan dengan kualitas terbaik bagi semua kalangan, maka NU harus bisa memberikan sumbangsih untuk kemaslahatan dalam berpolitik dengan tradisi keilmuan dalam merespon segala persoalan, mengedepankan

etika yang beradab, dan terbuka dalam menerima kemajuan zaman atau pun kreatifitas berfikir.

Menurut KH.Kaswad Sartono Etika politik NU pada tahun 1952 Mukhtamar ke-19 di Palembang menjadi titik penting NU dengan keputusan memisahkan diri dari Masyumi dan menjadi partai tersendiri sebagai partai politik. Kemudian pada tahun 1984 mukhtamar ke-27 di situbondo NU memutuskan untuk kembali ke khittah 1926 bahwa NU sebagai organisasi diniyyah islamiyyah dan ijtima'iyyah selanjutnya NU secara kelembagaan tidak berpolitik. Dalam istilah tokoh NU atau slogan NU yaitu NU tidak kemana mana tapi ada di mana mana artinya lembaga NU tidak boleh mendukung atau berpolitik kegiatan politik praktis tapi warga NU bebas memutuskan hak politiknya kepada partai manapun maka secara jam'iyyah (warga NU/ Nahdiyyin/kultural) bebas memilih secara pribadi, secara jam'iyyah(organisasi atas nama NU) tidak boleh berpolitik praktis mendukung Capres, Cawapres, Calon DPR RI, DPD RI, Calon gubernur, Wakil Gubernur, Calon bupati, Wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, calon DPRD Provinsi/kabupaten/kota apalagi menjadi tim sukses.

Bagi pengurus NU khususnya ketua boleh mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah maka dia harus mengundurkan diri atau menonaktifkan dirinya sebagai pengurus NU ketika dia berhasil menduduki kursi pemerintahan ia tidak boleh menjabat sebagai ketua NU tapi boleh menduduki dalam jabatan mustasyar, ahwan dan lain lain kalau tidak jadi maka punya hak untuk menduduki jabatan ketua NU kembali adapun nilai-nilai politik NU 1.) berakhlakul karimah 2.) Taat asas/aturan 3.) Berwawasan ahlusunnah wal jmaah yang tawasuth (moderat), Tawazun (seimbang), Tasamuh (toleran) dan al-adalah (adil)

Esensi dari NU tidaklah terletak pada ambisi politik untuk merebut kekuasaan, melainkan pada upaya politik (keagamaan) yang selalu berakar pada prinsip keberakatan. Oleh karena itu, bagi umat Islam Indonesia yang menginginkan praktik dan pemikiran keagamaannya yang sesuai dengan tradisi lokal, keberadaan NU dianggap sebagai penjaga tradisi tersebut. Jika kita menyebut hal ini sebagai tindakan politik yang berbasis pada keberakatan secara umum, maka politik semacam ini pantas dianggap sebagai pencapaian tertinggi NU dalam ranah politik. Sebagai contoh, dalam politik kekuasaan, keterlibatan awal NU terjadi ketika mereka mendukung pendirian Masyumi. Ketika menjadi organisasi pendukung Masyumi, tokoh-tokoh NU terlibat dalam pertarungan untuk memperoleh kekuasaan, baik melalui posisi di dalam partai maupun di luar partai (seperti di lembaga eksekutif).

sembilan pedoman berpolitik warga NU hasil Mukhtamar ke-28 NU tahun 1989 di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta sebagai berikut :

1. Partisipasi dalam bidang politik serta keterlibatan aktif dalamnya haruslah konsisten dengan prinsip-prinsip filsafat negara dan sejalan dengan Konstitusi UUD 1945.
2. Politik NU yang didasarkan pada semangat kebangsaan dalam memelihara integritas negara dan mencapai visi bersama, juga meneguhkan semangat ibadah yang diarahkan untuk memelihara kedaulatan negara.
3. Politik NU mewakili nilai-nilai kemerdekaan yang harus dipelihara serta memberikan pendidikan kepada masyarakat mengenai kesadaran akan hak-hak dan kewajiban dalam konteks bernegara.
4. Partisipasi dalam politik bagi NU adalah sebuah kewajiban moral yang harus dipegang teguh, sebagai ilham dari Allah SWT yang mendorong untuk memelihara nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
5. Keterlibatan dalam politik bagi NU didasarkan pada prinsip kejujuran dan moralitas agama, serta kesetiaan pada konstitusi dan penghormatan terhadap norma yang telah

ditetapkan, juga melibatkan pengembangan musyawarah sebagai cara untuk menyelesaikan masalah.

6. NU berpolitik dengan tujuan memperkuat mufakat nasional, yang sejalan dengan prinsip akhlak mulia sebagai ajaran ahlusunnah wal jamaah
7. Berpolitik menurut NU Bukan untuk kepentingan pribadi yang mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah persatuan dengan tanpa alasan
8. Dalam perbedaan pendapat tentang aspirasi politik haruslah menjunjung persaudaraan, tawadhu' serta menghargai, sehingga lingkungan politik dalam NU tetap terjalin persatuan dan kesatuan NU
9. Dalam perpolitikan NU haruslah terjalin hubungan timbal balik terhadap masyarakat dalam pembangunan negara demi menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan organisasi masyarakat yang mandiri dan efektif dengan maksud berperan sebagai wadah masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dalam proses pembangunan

Adapun pendapat Kiai Sahal terkait etika politik dapat dipetakan dalam tiga hal besar:

Pertama, bahwa politik kebangsaan perlu di pertimbangkan dengan baik sebagai gagasan utama politik, yang memungkinkan kekuasaan dapat mengaburkan nilai-nilai agama, organisasi masyarakat, dan kebangsaan

Kedua, Islam sebagai inspirasi negara artinya bahwa islam bukanlah slogan yang hanya membantu mendorong kekuasaan dalam mencapai tujuannya tapi islam digunakan real untu menyejahterakan masyarakat sebgaimana rasulullah membawa islam bukan untuk meraih kekuasaan tetapi untuk mencapai kebaikan dan kesejahteraan dalam masyarakat maka tak etislah apabila lambang-lambang agama digunakan untuk mecapai kepentingan kekuasaan

Ketiga, dalam fiqih siyasah berperan untuk mengembangkan konsep kenegaraan yang mampu menselaraskan antara masyarakat dan pemerintah maupun agama dan negara maka dalam mayoritas penganut syafiiyyah dalam fiqih siyasah haruslah menjaga al-dariyah al khomsah

Partisipasi politik didefinisikan sebagai aktifitas yang melibatkan diri dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program, memperoleh manfaat, dan mengevaluasi program. Sementara menurut Miriam Budiarjo, partisipasi politik adalah keterlibatan individu atau kelompok secara aktif dalam kehidupan politik, seperti melalui pemilihan pemimpin negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Aktivitas ini mencakup memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai politik atau kelompok kepentingan, serta menjalin hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen. Sementara menurut McClosky, yang dikutip oleh Miriam, partisipasi politik adalah tindakan sukarela dari anggota masyarakat dalam proses pemilihan pemimpin, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta dalam pembentukan kebijakan publik.

Dalam mengartikan partisipasi politik, NU merumuskan strategi yang bertujuan menjaga keharmonisan setiap warga Negara Indonesia dengan mengadopsi Pancasila sebagai landasan negara. Namun, NU tetap teguh pada sikapnya; meskipun sepakat dengan Pancasila, namun menolak pelembagaan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) oleh Pemerintah. NU khawatir bahwa P4 di masa mendatang bisa menggantikan posisi agama dan menjadi panduan utama dalam segala aktivitas. Sebagai contoh, dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa Pancasila, ada kemungkinan bahwa orang Islam akan merasa terdorong untuk menjalankan ibadah dan shalat semata-mata karena ketaatan pada Pancasila sebagai landasan, bukan karena ketaatan kepada Allah. NU

mengkhawatirkan hal ini, karena ibadah dan shalat seharusnya dilakukan karena ketaatan dan kepatuhan kepada Allah, bukan semata karena Pancasila.

NU secara resmi mengambil jarak dari praktik politik melalui kesepakatan dalam Muktamar ke-27 di Situbondo pada tahun 1984. Konsepsinya adalah untuk kembali pada pesan substansial yang mendasari pendiriannya, yaitu Khittah 1926, yang menekankan menjaga kemandirian dari dunia politik sambil mengubahnya menjadi gerakan sosial. Baik di internal NU maupun di tingkat nasional, NU selalu mengambil sikap kritis terhadap kekuasaan yang otoriter. Pada masa itu, nama NU memang sangat dihormati dan dihargai. Para elit NU giat melakukan pemberdayaan umat, termasuk dalam semangat kebangsaan dengan menggalang dukungan lintas komunitas. Namun demikian, ketertarikan pada politik masih terus ada di kalangan NU. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Pertama, partai politik masih dianggap relevan dalam memperjuangkan kepentingan NU, atau paling tidak elite NU. Relevansi ini tidak terlepas dari manfaat-manfaat yang diperoleh NU selama terlibat dalam politik. Bibit Suprpto mengidentifikasi manfaat tersebut, yang meliputi bidang keagamaan, politik, dan sosial budaya, dari tahun 1952 hingga 1973.

Salah satu tokoh terkenal yang membawa nilai-nilai etika politik Islam dan identitas khas masyarakat NU adalah Abdurrahman Wahid, yang akrab disapa Gus Dur. Gus Dur, sebagai seorang yang lahir di keluarga agamis dan wali yang disegani karena kedekatannya dengan Tuhan, menjadikan fenomena kemanusiaan sebagai fokus utamanya. Saya yakin bahwa semakin dekat seseorang dengan Tuhan, semakin dekat pula dia dengan sesama manusia, sehingga menghargai perbedaan dan memperjuangkan orang-orang yang kurang beruntung menjadi bagian dari prinsipnya. Gaya kepemimpinan merupakan pola perilaku yang menjadi dasar setiap tindakan seorang pemimpin, baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Variasi dalam gaya kepemimpinan timbul karena adanya kombinasi antara filosofi, keterampilan, sifat, dan sikap yang menjadi dasar dari perilaku individu tersebut. Secara substansial, gaya kepemimpinan adalah hasil dari kombinasi yang unik dari filosofi, sikap, sifat, dan keterampilan yang diterapkan oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya.

Dalam setiap konteksnya, tiap presiden Indonesia menunjukkan gaya kepemimpinan yang unik. Sebagai contoh, DR. K.H. Abdurrahman Wahid, atau Gus Dur, lahir di Jombang, Jawa Timur, pada 7 September 1940. Gus Dur menjabat sebagai presiden ke-4 Indonesia dari tahun 1999 hingga 2001, menggantikan B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasarkan hasil pemilu 1999. Gaya kepemimpinan Gus Dur sangat dipengaruhi oleh berbagai pengalaman hidupnya. Salah satu keahlian yang membedakan Gus Dur adalah kemampuannya dalam menangani konflik di Papua selama masa kepemimpinannya.

Dengan kerendahan hatinya serta ketawaduannya, Gus Dur selalu berusaha untuk menjadi bagian dari masyarakat Papua, menunjukkan empati, memahami, dan menghargai nilai-nilai yang dihormati, serta menunjukkan keberpihakan dengan tindakan nyata. Gus Dur sekali lagi membuktikan bahwa pendekatan humanis adalah kunci untuk meredakan konflik di Papua secara damai dan elegan. Pendekatan pluralisme yang diajarkan oleh Gus Dur menekankan pentingnya berpikir dan bertindak, yang keduanya merupakan aspek fundamental untuk menumbuhkan toleransi. Pengakuan akan pluralitas dalam hati dan perilaku merupakan fondasi dari sikap toleran yang tidak tergantung pada faktor apapun.

Dengan dedikasi dan usaha kerasnya, Gus Dur telah memberikan kontribusi penting dalam membangun Indonesia menuju arah yang lebih baik. Meskipun masa kepemimpinannya relatif singkat, pencapaiannya sangat luar biasa, dan dampaknya masih terasa hingga kini. Sebagai salah satu tokoh berpengaruh di Indonesia, Gus Dur

menunjukkan sifat-sifat yang patut menjadi teladan, terutama bagi generasi muda. Beberapa nilai yang dapat kita ambil contoh dari sosok Gus Dur antara lain: Kemanusiaan, Cinta Tanah Air, Keadilan, Nilai Keagamaan, Rasa Persaudaraan yang Tinggi, dan Kesederhanaan.

Dari contoh di atas, terlihat jelas bagaimana Nahdlatul Ulama (NU) telah berhasil memberdayakan masyarakatnya di bidang politik dengan menanamkan nilai-nilai etika Islam sesuai ajaran syariat Islam. Ini tidak hanya melibatkan pembentukan kesadaran politik yang Islami, tetapi juga menciptakan masyarakat yang beradab di tengah-tengah sistem demokrasi, di mana demokrasi dipandang sebagai pilihan terbaik untuk pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks relasi konstruktif antara negara dan masyarakat, penting untuk memahami tiga alasan mengapa demokrasi dianggap esensial. Pertama, demokrasi bukan hanya merupakan bentuk pemerintahan ideal yang dapat direalisasikan, tetapi juga sebuah doktrin politik yang mulia yang membawa manfaat bagi mayoritas negara. Kedua, sebagai sistem politik dan pemerintahan, demokrasi telah terbukti sepanjang sejarahnya mampu menjaga stabilitas dalam sistem politik. Ketiga, demokrasi dianggap sebagai sistem yang paling alami dan manusiawi, sehingga jika diberikan kebebasan untuk memilih, mayoritas rakyat di negara mana pun akan memilih demokrasi sebagai pilihan mereka. Yang semuanya itu didasarkan pada ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama sebagai organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia.

KESIMPULAN

pentingnya etika politik dalam praktek politik NU yang tidak hanya berlandaskan pada kepentingan keagamaan tetapi juga nilai-nilai universal yang mendukung integritas, kerjasama, dan pelayanan publik. Dengan memahami dasar moral yang mendorong NU, kita dapat lebih memahami kontribusinya dalam membentuk politik Indonesia yang lebih adil dan berkelanjutan.

Banyaknya usaha-usaha masyarakat NU dalam menegakkan etika politik berbasis syariat Islam ini menunjukkan bahwa anggota NU aktif dalam upaya menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam politik. Mereka berusaha mempraktikkan nilai-nilai Islam dalam pengambilan keputusan politik.

Bentuk usaha tersebut melalui musyawarah dan praktiknya melalui tokoh-tokoh NU Masyarakat NU menggunakan musyawarah sebagai sarana untuk mencapai kesepakatan politik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, tokoh-tokoh NU yang terlibat dalam politik juga berperan dalam mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam praktik politik sehari-hari.

Prestasi yang diraih dengan pedoman politik yang dibentuk melalui mukhtamar Mukhtamar NU adalah forum penting di mana pedoman-pedoman politik diputuskan. Prestasi yang telah diraih masyarakat NU dalam politik didasarkan pada pedoman-pedoman nya. Menata negara dan menjaga kedaulatan teritorial Masyarakat NU tidak hanya terlibat dalam politik domestik, tetapi juga dalam membangun dan menjaga kedaulatan negara. Mereka berkontribusi dalam proses pembentukan dan pengelolaan negara, serta dalam mempertahankan wilayah negara dari ancaman luar. Evolusi dan adaptasi dalam mempertahankan agama dan negara NU terus mengalami perkembangan dan beradaptasi dengan perubahan zaman dalam upaya mempertahankan nilai-nilai agama Islam dan kedaulatan negara. Ini menunjukkan keterlibatan mereka yang berkelanjutan dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan politik.

Dengan demikian, bagaimana masyarakat NU aktif terlibat dalam politik dengan mempraktikkan nilai-nilai Islam dan berperan dalam pembentukan serta pemeliharaan di

negara modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Arake, Lukman, 'Perkembangan Sosial Politik Dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam', *Al-Fikr*, 17.1 (2013), 176–89
- Asmarani, Anugrah, 'ETIKA POLITIK DALAM PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA', *Correspondencias & Análisis*, 15018, 2021, 1–23
- Chalik, Abdul, *Nahdlatul Ulama Dan Geopolitik Perubahan Dan Kesenambungan*, Cet. X (Yogyakarta: impulse & Buku Pintar Yogyakarta, 2011)
- Clony Christy Gracy, Tiara Alfarissa, Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.h., 'Dinamika Kepemimpinan Gus Dur Sebagai Presiden', *Jurnal Veteran*, April, 2022.
- Dr. Sirojuddin Aly, MA., 'Pemikiran Politik Islam: Sejarah, Praktik Dan Gagasan', Suparyanto Dan Rosad (2015, 5.3 (2020), 248–53.
- Fahmi, Irfan, Bagus Takwin, and Roby Muhamad, 'Nilai Moral Sebagai Prediktor Orientasi Politik Pada Anggota Organisasi Keagamaan', *Psymphathic : Jurnal Ilmiah Psikologi*, 6.2 (2019), 165–80.
- Haidar, M. Ali, 'NAHDATUL ULAMA DAN ISLAM DI INDONESIA Pendekatan Fikih Dalam Politik', *Ebp.Aaykpn.Ac.Id*, 1994, 1–357
- Hakim, Lukman, and Eka Anjani, 'Representation of Gus Dur's Message of Peace About Papua in Mamat Alkatiri's Stand Up Comedy', *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 33.1 (2022), 35–56.
- Kurniati, Kurniati, 'SISTEM POLITIK DEMOKRASI DALAM BIAS HEGEMONI NEGARA: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci', *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 7.2 (2018), 257.
- Mahatma, Masmuni, 'Paradigma Politik Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Bernegara', *Mawa'Izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 8.1 (2017), 31–54.
- Muhammad Iqbal, Mahathir, 'Nahdlatul Ulama Dalam Pusaran Politik: Sebuah Otokriktik Orientasi NU Dalam Politik Perspektif Insider', *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 1.2 (2019), 181.
- Muhammad Solikhudin, 'Ijtihad Politik Nahdlatul Ulama Dalam Konfigurasi Pemikiran Fikih Siyash KH MA Sahal Mahfudh', *Ahkam*, 9.2 (2021), 269–300.
- Patoni, '9 Pedoman Berpolitik Warga NU', 2018, pp. 1–7
- Pujiningsih, Sri, 'Hubungan Antara Hukum Dan Etika Dalam Politik Hukum Di Indonesia (Membaca Pancasila Sebagai Sumber Nilai Dan Sumber Etik)', *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 17.1 (2017), 28–36.
- Puspitasari, Sri Hastuti, 'Mahkamah Konstitusi Dan Penegakkan Demokrasi Konstitusional', *Jurnal Konstitusi*, 8.3 (2011), 383–84
- Rohman, Yani Fathur, 'Memaknai Kembali Pemikiran Gus Dur: Studi Pada Komunitas Gusdurian Sunter Jakarta', *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 3.2 (2020), 169–84
- Roviana, Sri, 'Gerakan Perempuan Nahdlatul Ulama Dalam Transformasi Pendidikan Politik', *Jurnal Pendidikan Islam*, 3.2 (2014), 403
- Shobacha, Nurul, 'Strategi Politik Nahdlatul Ulama Di Era Orde Baru', *Jurnal Review Politik*, 02.1 (2012), 99–113
- Suardita, I ketut, 'Pentingnya Nilai Etik Dan Moral Dalam Setiap Penyelenggara Negara', *USDI Universitas Udayana*, 2018, 1–7
- Ulfah, Nufikha, Yayuk Hidayah, and Meiwatizal Trihastuti, 'Urgensi Etika Demokrasi Di Era Global: Membangun Etika Dalam Mengemukakan Pendapat Bagi Masyarakat Akademis Melalui Pendidikan Kewarganegaraan', *Jurnal Kewarganegaraan*, 5.2 (2021), 329–46